**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Amerika merupakan negara adi daya (*super power*) yang memiliki kekuatan ekonomi terkuat di dunia, dan memberikan kontribusi sekitar 20 - 30% dari perputaran ekonomi dunia. Ekonomi Amerika Serikat memiliki PDB (Pendapatan Domestik Bruto) sebesar US$ 15,5 Triliun pada akhir tahun 2011 (seperempat dari PDB dunia). Meskipun mengalami krisis, namun tetap saja masih berpengaruh kuat dalam percaturan ekonomi dunia.

Pada pertengahan tahun 2007, Amerika Serikat dilanda krisis *subprime mortgage[[1]](#footnote-2)* danmemuncak pada September 2008, yang ditandai dengan pengumuman kebangkrutan beberapa lembaga keuangan. Awal mula masalah tersebut terjadi pada periode 2000-2001, saat saham-saham perusahaan *dotcom* di Amerika Serikat kolaps, sehingga perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham tersebut tidak mampu membayar pinjaman ke bank. Untuk mengatasihal tersebut, *The Fed* (Bank Sentral AS) menurunkan suku bunga. Suku bunga yang rendah dimanfaatkan oleh para perusahaan *developer* dan perusahaan pembiayaan perumahan. Rumah- rumah yang dibangun oleh *developer* dan dibiayai oleh perusahaan pembiayaan perumahan adalah rumah-rumah murah, dijual kepada kalangan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki jaminan keuangan yang memadai. Dengan runtuhnya nilai saham perusahaan-perusahaan tersebut, bank menghadapi gagal bayar dari para debiturnya (*developer* dan perusahaan pembiayaan perumahan).

*The Fed (The Federal Reserve)* telah hati-hati dalam mengambil kebijakan guna menyelamatkan perekonomian. Terakumulasinya dana besar di sektor perumahan telah melahirkan stagnasi yang berakibat melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2007 yang diperkirakan tumbuh 2,3%, padahal tahun 2006 tumbuh 3,3%. Keadaan ini juga diikuti dengan memburuknya keadaan sosial dengan tingkat angka pengangguran pada awal tahun 2007 sebesar 4,4% dengan tingkat inflasi 2,1%. Sedangkan saat krisis tahun 2008, tingkat pengangguran di Amerika Serikat meningkat menjadi 6,8% dengan tingkat inflasi 5,6%.

Untuk menanggulangi krisis, The Fed pada pertengahan Agustus 2007 bersama-sama dengan bank sentral Eropa dan Jepang, mengucurkan likuiditas ke pasar uang (*Tapering/Quantitive Easing*) lebih dari US$400 miliar dan menurunkan suku bunga 50 bsp., guna mengatasi kepanikan para investor global. Tetapi tampaknya moment kurang tepat, karena krisis perumahan sudah menembus ke sektor riil.

Guna gerakan ekonomi agar bangkit kembali, sejak tanggal 18 September 2007 sampai akhir Desember 2007 *The Fed funds rate* diturunkan dari 5,25 % menjadi 4,25%, turun lagi menjadi 3,5% (22 Januari 2008) dan 3% pada akhir Januari 2008, bahkan menuju ke 2,5% hingga dibawah 0%.

*The Fed* memberi stimulus fiskal melalui pembelian surat-surat berharga sebesar $1.75 trilliun yang disebut *Quantitive easing*, pada tahun 2010 *The Fed* kembali mengucurkan $600 milliar yang dikenal QE2. Lalu pada September 2012 karena tingkat pengangguran tinggi *The Fed* kembali mengucurkan $85 milliar dalam sebulan yang disebut QE3 agar daya beli masyarakat meningkat dan konsumsi pun meningkat.[[2]](#footnote-3)

Memasuki bulan Januari 2014, bank sentral Amerika Serikat, *The Fed*, dengan resmi melakukan pemangkasan stimulus fiskal (*tapering off*) yang telah digelontorkan sejak tahun 2008[[3]](#footnote-4). Ben Bernanke, selaku Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat mengumumkan hal itu di Washington DC dalam sesi konferensi press terakhirnya selama tahun 2013, Ben Bernanke mengumumkan Bank Sentral akan melakukan pemangkasan stimulus fiskal dari dana yang telah mengalir ke pasar (*tapering*)   sebesar US$ 85 juta sejak Amerika Serikat dilanda krisis keuangan dengan menarik stimulus (*tapering off*) secara bertahap mulai dari US$ 75 miliar – US$ 4 trilliun.[[4]](#footnote-5)

Terintegrasinya dunia dan pergeseran nilai yang terjadi di internal suatu kawasan tampak akan berpengaruh kepada negara-negara lain di dunia yang melakukan perdagangan internasional. Berakhirnya paket stimulus di Amerika pada awal tahun 2014, berdampak terhadap ekonomi dunia termasuk Indonesia.

Perkembangan perekonomian dunia yang sedang tidak menggairahkan menyebabkan prospek perekonomian Indonesia ke depan masih diliputi oleh nuansa ketidakpastian yang tinggi dimana pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sebesar 3,5% sebagai kenaikan pertama dalam lima tahun terakhir[[5]](#footnote-6). Di sisi lain harga komoditas ekspor masih lambat, di antaranya kakao, cokelat, dan kelapa sawit (CPO) belum kembali ke harga normal telah menyumbang kelesuan ekonomi domestik[[6]](#footnote-7). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data kinerja ekspor sepanjang tahun 2014 yang secara kumulatif jumlahnya mengalami penurunan hingga 3,43 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2013.[[7]](#footnote-8)

Sejarah pembangunan ekonomi negara dunia ketiga selalu diwarnai fluktuasi yang cukup tajam. Seiring dalam kurun waktu tertentu, tiba-tiba kinerja perekonomian negara dunia ketiga berbinar-binar dengan indikator makro ekonomi yang mengesankan, misalnya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, akumulasi investasi, dan intesitas perdagangan internasional. Tetapi tidak lama setelahnya, segera dijumpai realitas yang berlawanan, perekonomian tiba-tiba ambruk dengan sebab dan sumber yang tidak pernah jelas. Fenomena ini jelas sangat menggangu. Indonesia sebagai bagian dari negara dunia ketiga juga tidak lepas dari fenomena tersebut, perekonomiannya tidak pernah stabil. Sering diuntungkan akibat rejeki yang tidak terduga (misalnya dari minyak), tapi lebih sering lagi dijungkalkan akibat pertemuan masalah domestik dan ancaman ekonomi internasional[[8]](#footnote-9).

Keberhasilan sistem *Bretton Woods* dalam meningkatkan peran perdagangan internasional di dalam perekonomian dunia telah menciptakan *open economy* diamana saat ini semakin banyak negara yang perekonomiannya terbuka yang bertujuan untuk terpeliharanya posisi neraca pembayaran yang sehat dan semakin kuat sebagai syarat kestabilan ekonomi.

Menurut John Williamson, ekonom dari *The Institute of International Economics*, Washington, DC., persyaratan itu disebut *Washington Consensuss* yang telah menciptakan bentuk manajemen ekonomi makro yang membuat Indonesia semakin terintegrasi ke dalam sistem perdagangan, finansial dan investasi global.

Ekonomi global 2013 diwarnai ketidakpastian di pasar keuangan global terkait isu pengurangan stimulus moneter (*tapering off*) di Amerika Serikat. Gejolak di pasar keuangan yang terjadi memicu aliran modal asing keluar dari negara *emerging market* menuju negara maju, terutama AS, sejalan dengan munculnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS. Indonesia, yang menjadi salah satu tempat penanaman modal portfolio asing, juga tidak terlepas dari dampak rencana *tapering off* ini, dimana terjadi aliran modal asing yang keluar cukup signifikan dari pasar keuangan domestik. Selain itu, keluarnya aliran modal asing dari Indonesia juga dipicu oleh persepsi negatif investor asing terhadap tekanan inflasi yang sempat tinggi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dan defisit transaksi berjalan yang melebar. Keseluruhan hal ini berakibat pada menurunnya surplus transaksi modal dan finansial. Melebarnya defisit transaksi berjalan dan menurunnya surplus transaksi modal dan finansial menyebabkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit setelah sebelumnya mengalami surplus.

Perubahan siklus global berupa menurunnya permintaan global dan turunnya harga komoditas global menyebabkan pertumbuhan ekspor mencatat kontraksi sehingga memengaruhi kinerja transaksi berjalan, yang telah mengalami defisit sejak triwulan IV-2011. Defisit transaksi berjalan yang semakin melebar tidak terhindarkan mendorong nilai tukar rupiah bergerak dalam tren melemah. Eskalasi pelemahan rupiah semakin kuat terjadi sejak pertengahan Mei 2013 sampai menjelang akhir September 2013, saat terjadi aliran keluar modal asing di pasar keuangan yang meningkat akibat rencana pengurangan stimulus moneter di AS dan persepsi negatif investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Sebagai akibatnya rupiah pada tahun 2013 terdepresiasi cukup tajam dibandingkan tahun 2012, baik secara *point to point* ataupun secara rata-rata.

Kondisi tersebut menimbulkan perkembangan ekonomi yang rentan terhadap fluktuatif ekonomi global. Defisit neraca transaksi berjalan, menimbulkan pelemahan rupiah yang terus menerus tanpa adanya keuntungan dari sisi ekspor. Pada akhirnya, ekonomi semacam ini mudah terjangkit krisis ekonomi internasional, sehingga mempersulit usaha untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya karena selalu defisit. Untuk perekonomian yang sudah patalogis semacam ini, tuntutan untuk memperkuat industri manufaktur melalui pembangunan infrastruktur, diakui tidaklah mudah.[[9]](#footnote-10)

Melihat kondisi tersebut sangat jelas bahwa ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan dukungan investor asing dalam pasar modal yang menyebabkan kerapuhan serta sulitnya mencapai stabilitas ekonomi. Kedua hal tersebut, sangat ditentukan oleh kebijakan moneter *The* *Federal Reserve* baik kebijakan pelonggaran moneter maupun pengetatan moneter. Kedua kebijakan *The Fed* itu berpengaruh terhadap ekonomi seluruh dunia termasuk Indonesia, terlebih kebijakan pengetatan moneter memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang terjadi saat ini dimana kebijakan penarikan stimulus (*tapering off*) *the Fed* untuk mengakhiri *quantitive easing* menyebabkan kelangkaan dan penguatan dolar atas mata uang lainnya termasuk rupiah. Disinilah yang menjadi pangkal permasalahan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mengalami penurunan.

Kebijakan *The Fed* tersebut menyebabkan instabilitas sektor finansial Indonesia terutama pada nilai tukar rupiah dimana investor asing berlomba-lomba memindahkan sahamnya ke luar negeri (*capital outflow*) sehingga membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah (depresiasi), tentu ini menimbulkan kepanikan pada ekonomi domestik karena investor asing lebih banyak berinvestasi jenis fortopolio (saham) berjangka pendek dibanding investasi padat modal. Kondisi itu membuat harga bahan baku impor menjadi mahal dimana kebutuhan bahan industri lokal 80% menggunakan barang modal dan bahan baku impor sehingga membuat biaya produksi membengkak dan dapat menimbulkan inflasi.

Apabila *The Fed* menaikkan suku bunga maka *capital outflow* akan terjadi dalam jumlah yang sangat besar dapat mematikan ekonomi Indonesia karena *hot money* yang diparkir di Bursa Efek hengkang mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang oleh investor asing terutama dalam pembiayaan fiskal dan defisit neraca transaksi berjalan.[[10]](#footnote-11) Dalam teori ekonomi, **krisis ekonomi** yang terjadi akan mengalami beberapa **fase.** Fase pertama yakni banyaknya modal asing masuk lewat sektor perbankan. Kedua, banyaknya modal asing yang masuk melalui *capital market*, seperti pasar modal. Ketiga, akan ada modal asing yang keluar disebut *capital outflow* (kembali kenegaranya masing-masing) dari perbankan dan *capital market* tersebut[[11]](#footnote-12).

Stabilitas keuangan erat kaitannya dengan kesehatan suatu perekonomian. Semakin sehat sektor keuangan di suatu negara, semakin sehat pula perekonomian, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian perkembangan sektor keuangan, termasuk di dalamnya nilai tukar, merupakan salah satu indikator yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan atau kestabilan perekonomian. Fluktuatif nilai tukar yang disebabkan oleh kebijakan *the Fed* dapat menimbulkan persepsi para investor terhadap kondisi perekonomian Negara tersebut*.* Persepsi ini pada akhirnya akan mempengaruhi dana investasi yang masuk ke negara tersebut, sehingga mempengaruhi keadaan perekonomian negara yang bersangkutan.

Nilai tukar Rupiah terhadap USD mulai merosot sejak pertengahan tahun 2008 dan terus terdepresiasi hingga mencapai level terendah pada awal tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 13.000 per 1 USD. Perubahan nilai tukar yang terjadi, baik apresiasi maupun depresiasi akan mempengaruhi kegiatan ekspor impor di negara tersebut, karena USD masih merupakan mata uang yang mendominasi pembayaran perdagangan global.

Dengan begitu kompleksnya dampak dari kebijakan *The Fed* tersebut, penulis sangat tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai keterkaitan kebijakan The Federal Reserve terhadap stabilitas ekonomi makro Indonesia terutama pada stabilitas nilai tukar rupiah karena dampak dari instabilitas finansial berpengaruh terhadap stabilitas bidang-bidang lain oleh sebab itu kebijakan *The Federal Reserve* yang merupakan poros kebijakan Amerika Serikat mutlak harus kita perhatikan. Atas dasar itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul :

**“Pengaruh Kebijakan The Federal Reserve Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana kebijakan moneter *The Fed* pasca krisis ekonomi Amerika 2008 terhadap dinamika pembangunan ekonomi global?
2. Sejauhmana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga ruang fiskal dan moneter terhadap perkembangan kebijakan moneter ketat  *The Fed*?
3. Sejauhmana stabilitas kebijakan nilai tukar rupiah dalam merespon tindakan moneter ketat *The Fed*?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat bahasan penelitian ini masih cukup luas, maka penulis membatasi penelitian tersebut yaitu stabilitas nilai tukar rupiah pada ruang fiskal dan moneter serta kebijakan moneter ketat (*tapering off* dan rencana kenaikan suku bunga) *The Federal Reserve.*

1. **Rumusan Masalah**

Agar mempermudah dalam menganalisa permasalahan berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka dirumuskan suatu masalah yaitu:

**“Sejauhmana kebijakan pemerintah Indonesia menjaga ruang fiskal dan moneter bagi stabilitas nilai tukar rupiah korelasinya dengan kebijakan moneter ketat *The Fed?*”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitia**

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui kebijakan *The Federal Reserve* pasca krisis ekonomi Amerika 2008 terhadap dinamika pembangunan ekonomi dunia.
2. Untuk mengetahui Sejauhmana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga ruang fiskal dan moneter terhadap perkembangan kebijakan moneter ketat *The Fed*.
3. Untuk mengetahui sejauhmana stabilitas kebijakan nilai tukar rupiah dalam merespon tindakan moneter ketat *The Fed*.
4. **Kegunaan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara akademik sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana program Strata Satu (S1) pada jurusan studi Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung.
2. Secara teoritis sebagai referensi tambahan bagi pengembangan studi hubungan internasional yang berkaitan dengan masalah yang penulis sedang teliti yaitu mengenai Pengaruh Kebijakan *The Federal Reserve* Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia yaitu nilai tukar rupiah.
3. Dapat memberikan kontribusi terutama sebagai penambah wawasan pengetahuan sebagai aspek yang saling berkaitan dalam realita sebagai peristiwa, masalah dan fenomena internasional yang sedang diteliti khususnya dalam masalah yang berhubungan dengan ekonomi politik internasional maupun core subjek lainnya yang masih berhubungan.
4. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
5. **Kerangka Teoritis**

Istilah hubungan internasional mengandung makna yang beragam. Istilah itu tidak saja dipahami secara berbeda-beda oleh para awam (non expert), namun diantara para ahli sendiri juga belum terdapat kebulatan pendapat[[12]](#footnote-13).Untuk mengetahui pemahaman yang lebih dalam sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan, maka penulis mengutip teori atau pendapat dari para ahli yang tentunya berkorelasi dengan objek yang diteliti, hal ini dilakukan untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian hingga diakui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis. Adapun definisi mengenai pengertian hubungan internasional seperti menurut Charles McClelland sebagai berikut :

**“Hubungan internasional merupakan studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, serta berbagai respon perilaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termasuk komponen-komponennya[[13]](#footnote-14).”**

Penulis menggunakan pendekatan neorealisme yang dicetuskan [John Mearsheimer](http://id.wikipedia.org/wiki/John_Mearsheimer) dalam bukunya *The Tragedy of Great Power Politics New York* yang mengemukakanrealisme ofensif berpendapat bahwa negara harus senantiasa mencari peluang untuk mendapatkan power sebanyak mungkin. Tujuan utama dari masing-masing negara tersebut haruslah untuk mendapatkan kekuasaan atau hegemoni yang sebesar-besarnya, karena itu adalah satu-satunya cara terbaik untuk dapat menjamin kelangsungan hidup atau mempertahankan eksistensi mereka sebagai sebuah negara.[[14]](#footnote-15)

Sedangkan Dalam hubungan Internasional suatu negara tidak lepas dari kepentingan nasional, seperti menurut Smith mengatakan bahwa kepentingan nasional adalah :

**“Kepentingan nasional sebagai upaya mengejar keuntungan materi sendiri adalah kondisi normal manusia. Ini adalah akumulasi dari kepentingan diri masing-masing individu. Sebuah keadaan alami yang diproduksi tanpa pikiran sadar atau perencanaan.[[15]](#footnote-16)”**

Dengan adanya kepentingan nasional, maka setiap negara melakukan interaksi dalam arena internasional untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Fenomena ini terjadi dalam politik internasional. Didalam bukunya ‘Politik International’ K.J. Holsti mengatakan :

**“Teori politik internasional adalah suatu studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal, sebagai reaksi atas respon atas negara lainnya. Selain mencakup unsur power atau kekuatan, kepentingan juga mengakibatkan politik internasional mencakup *pengertian* sebagai suatu sistim internasional berupa penolakan atau penjegahan dan prilaku para pembuat keputusan dalam suatu konflik.”[[16]](#footnote-17)**

Dalam politik internasional, penulis menggunakan perspektif teori stabilitas hegemoni untuk menjaga stabilitas ekonomi yang intinya didasarkan atas prinsip keterbukaan ekonomi dan liberal, membutuhkan kehadiran dari sebuah kekuatan dominan atau hegemoni atau suatu bentuk kepemimpinan[[17]](#footnote-18). Charles P. Kindleberger berpendapat dalam bukunya *The World in Depression: 1929-1939* (1973) bahwa Teori Stabilitas Hegomoni adalah :

**“Distribusi kekuasaan terhadap satu negara membantu menyeimbangkan sistem moneter dan keuangan internasional karena kemauan satu kekuatan untuk menanggung biaya ekstra karena ketergantungan berat dan keuntungan potensial pada pengaturan kerjasama multinasional.”[[18]](#footnote-19)**

Begitupun menurut Robert Keohane yang seorang neo-realis strukturalis juga menekankan pentingnya peranan hegemoni sebagai berikut :

**“Pertahanan hegemoni struktur kekuatan, yang di dominasi oleh satu Negara, adalah lebih kondusif terhadap perkembangan rezim internasional yang kuat dan peraturannya relatif lebih tepat dan dipatuhi. Kemunduran dari struktur hegemoni kekuasaan diharapkan dapat menandakan sebuah penurunan kekuatan hubungan dari rezim internasional”[[19]](#footnote-20)**

Sumber kekuatan ekonomi menurut teori stabilitas hegemoni Kindleberg terdapat pada tiga hal, yakni hegemoni, norma liberal, dan kepentingan sama.Ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan bebas dapat di pertahankan di bawah kekuatan hegemonis suatu negara yang dapat memaksa negara-negara lain untuk memenuhi standar aturan tertentu seperti hegemoni dollar Amerika dalam perdagangan internasional yang keberadaannya begitu penting untuk menjaga stabilitas ekonomi negara-negara lain dimana fluktuatifnya bergantung pada kebijakan moneter *The Federal Reserve*.

Dalam politik internasional, suatu negara pasti melakukan interaksi dimana kondisi itu akan meningkat menjadi kerjasama untuk mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lainnya, adapun definisi tentang kerjasama internasional menurut K.J. Holsti yaitu :

**“Pandangan dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan mengahasilkan sesuatu dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu mencapai kepentingan dan nilai-nilainya, persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.”[[20]](#footnote-21)**

Dalam melakukan kerjasama tersebut, setiap negara mempunyai tujuan nasional yang ingin diperoleh dengan mengelola potensi sumber daya yang terdapat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam upaya mengelola potensi pemenuhan kebutuhan nasional yang berasal dari sumber daya yang terdapat di luar wilayah negaranya, amat penting bagi setiap negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional.[[21]](#footnote-22)Politik luar negeri secara umum didefinisikan oleh Walter Carlsnaes sebagai berikut :

**“Tindakan-tindakan yang diarahkan ke tujuan, kondisi dan aktor (baik pemerintah maupun non pemerintah) yang berada luar di wilayah territorial mereka dan yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan-tindakan itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen dan atau arah yang dinyatakan secara eksplisit dan yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama negara / komunitas yang berdaulat.[[22]](#footnote-23)”**

Ekonomi politik internasional tidak dapat dipisahkan serta selalu erat hubungannya dengan setiap interaksi global terutama dalam ekonomi internasional. Hubungan tersebut saling berkaitan antara aktor internasional yaitu negara dan pasar. Proses interaksi suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari faktor politis. Seperti yang dikemukakan oleh Robert Gilpin dalam *the political economy of international relations* sebagai berikut:

**“Ekonomi Politik Internasional adalah studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional (Gilpin, 1987:3).”[[23]](#footnote-24)**

Institusi dalam lingkup Ekonomi Politik Internasional merupakan sebuah organisasi internasional atau rezim internasional, dimana keduanya akan berusaha mengontrol pasar internasional. Sebagaimana yang dikutip dari perkataan Gilpin (2001:42) bahwa institusi atau rezim internasional ini merupakan salah satu usaha bagi aktor-aktor ekonomi powerful untuk mempengaruhi iklim keadaan sekitar sehingga mampu mendukung kepentingannya dalam membangun kesejahteraan, kekuatan militer dan keamanan.[[24]](#footnote-25)

Dalam hal ini, penulis menggunakan perspektif perang mata uang (*currency war*). Menurut Joseph E. Gagnon dalam bukunya *Currency Wars* (2003) mengatakan :

**“Perang mata uang adalah suatu cara memanipulasi mata uang melalui kebijakan moneter untuk melemahkan mata uangnya masing-masing (devaluasi) supaya meningkatkan ekspor yang menjadi pendorong utama perubahan surplus perdagangan dan defisit ."[[25]](#footnote-26)**

Dalam Perang mata uang, ada beberapa cara yang bisa diambil salah satunya adalah dengan cara melakukan stimulus moneter atau *quantitative easing* sehingga mendorong pasokan mata uang di dunia. Tujuan utamanya antara lain, dengan melemahnya mata uang dalam negeri, produk ekspor akan lebih berdaya saing karena harganya relatif lebih murah jika dinilai dengan mata uang asing. Dengan demikian mengakibatkan permintaan ekspor akan meningkat yang membuat sektor eksportir dalam suatu negara pun mengalami kenaikan. Predir Bank Dunia Robert Zoelick menggambarkan kondisi ini dengan istilah *"beggar thy neighbor".* Istilah itu sendiri menggambarkan kebijakan untuk mengatasi beberapa masalah antara lain, defisit perdagangan antar negara, lapangan pekerjaan, inflasi dengan tindakan yang merugikan negara lain (*neighbor*). Bentuk kebijakannya bisa berupa penerapan kuota ekspor, embargo, devaluasi mata uang untuk menurukan harga barang ekspor atau mengapresiasi nilai mata uang untuk menekan tingkat inflasi. Kebijakan ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara-negara maju sebab normalisasi suku bunga di negara-negara maju diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Suku bunga di negara maju akan dipertahankan di level rendah sehingga arus modal (*capital flow*) bisa terus mengalir ke negara-negara berkembang.[[26]](#footnote-27)

Dalam hubungan setiap negara di era globalisasi ini, tidak lepas dari kegiatan ekonomi internasional untuk memenuhi kebutuhan domestik, seperti yang dikatakan Paul R. Krugman dan Maurice Obsteld dalam bukunya yang diterjemahkan Faisal H. Basri edisi ke dua berjudul Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan mendefinisikan ekonomi internasional adalah :

**“Ekonomi internasional adalah persoalan-persoalan yang muncul karena masalah-masalah khusus yang terjadi dalam interaksi ekonomi antar bangsa yang berdaulat dimana motif dan perilaku individu dan perusahaan dalam perdagangan internasional persis sama dengan yang dijumpai dalam tranksaksi domestik.[[27]](#footnote-28)”**

Penulis menggunakan pendekatan *comparative advantage* (keunggulan relatif) dari J. S Mill yang menyatakan bahwa sekalipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan (*disadvantage*) *absolute* dalam memproduksi kedua komoditi jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung. Negara yang kuran efisien akan berspesialisasi dalam produksi ekspor pada komoditi yang mempunyai kerugian absolute lebih kecil. Dari komoditi inilah negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif. Di pihak lain, negara tersebut sebaliknya mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih besar (kerugian komparatif). Hal ini dikenal sebagai hukum keunggulan komparatif. Model ini lebih menekankan pada perbedaan jenis barang ekspor setiap negara.[[28]](#footnote-29)

Ekonomi internasional selalu berhubungan dengan perdagangan internasional karena tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Semua negara berpartisipasi dalam perekonomian dunia dan dihubungkan melalui perdagangan dan finansial. Adapun definisi perdagangan internasional menurut Paul R. Krugman dan Maurice Obsteld dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan menjelaskan bahwa :

**“Perdagangan Internasional adalah kegiatan pedagangan dimana antara bangsa dapat melakukan spesialisasi dalam produksinya, dengan demikian akan memperbesar produktifitas sumber daya sehingga akan memperoleh lebih banyak barang dan jasa. Negara-negara melakukan pedagangan internasional karena dua alasan utama : pertama, Negara-negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain, kedua, Negara-negara berdagang satu sama lain dengan tujuan mencapai skala ekonomis dalam produksi”. [[29]](#footnote-30)**

Penulis menggunakan pendekatan model Ricardian *comparative cost* (biaya relatif) yang menunjukkan nilai suatu barang tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut (*Labor cost value theory*). Perdagangan antar negara akan timbul apabila masing-masing negara mempunyai *comparative cost* yang kecil. Dalam model ini tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi dan setiap negara berbeda halnya dalam produktivitas tenaga kerja di industri-industri yang berbeda. Negara-negara akan mengekspor barang-barang yang tenaga kerjanya memproduksi dengan relatif lebih efisien, dan mengimpor barang-barang yang tenaga kerjanya kurang efisien. Dengan kata lain, pola produksi suatu negara ditentukan oleh keunggulan komparatif. Namun model Ricardian menyatakan bahwa memiliki produktivitas yang lebih tinggi di suatu industri dibandingkan dengan luar negeri tidak cukup untuk menjamin bahwa suatu negara akan mengekspor hasil-hasil industri yang bersangkutan.[[30]](#footnote-31) Model ini menekankan pada perbedaan waktu pekerja dalam memproduksi barang.

Perdagangan Internasional memicu perusahaan-perusahaan untuk melakukan bisnis sebagai ajang kompetisi untuk merebut pangsa pasar yang makin lama makin mengecil. Dalam kaitan ini, dapat dikatakan bahwa transaksi bisnis cenderung membawa konsekuensi politis sehingga disinilah perlunya memahami politik bisnis internasional seperti yang dijelaskan dalam buku Politik Bisnis Internasional karya Bob Sugeng Hadiwinata disebutkan bahwa :

**“Politik bisnis internasional merupakan studi yang membahas bisnis internasional dari kacamata politik, dimana faktor power (kekuasaan) dan struktur dianggap sebagai faktor-faktor penting yang mempengaruhi perilaku aktor-aktor negara dan nonnegara (seperti kelompok bisnis, lembaga keuangan internasional, rezim internasional dll) dalam melakukan transaksi bisnis antar bangsa dan antarwilayah.”[[31]](#footnote-32)**

Terdapat dua strategi umum yang diterapkan oleh negara berkembang dalam usaha menekan defisit transaksi berjalan pemerintah, yang pertama adalah kebijakan industri-substitusi impor dan yang kedua adalah industri orientasi ekspor (Krugman & Obstfeld, 2003:256). Kebijakan industri substitusi impor adalah yang paling sering digunakan oleh negara berkembang. Kebijakan ini dilaksanakan dengan membatasi impor produk manufaktur untuk merangsang pertumbuhan sektor manufaktur di industri domestik (Krugman & Obstfeld, 2003:256). Kebijakan ini kerap diterapkan sebab industri manufaktur di negara berkembang belum mampu berkompetisi dengan industri manufaktur dari negara maju yang telah berdiri dengan mapan. Dengan adanya restriksi impor melalui tarif dan kuota, industri dalam negeri diharapkan dapat berdiri dengan kokoh terlebih dahulu sebelum dapat diluncurkan ke pasar dunia yang kompetitif. Sedangkan cara lain mendukung manufaktur adalah melalui Industrialisasi Orientasi Eskpor (IOE). IOE memiliki karakteristik tertentu antara lain teknologi yang dipilih adalah teknologi padat karya yang dapat memberikan efek distribusi pendapatan yang lebih langsung dan lebih besar kepada anggota masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja yang luas sehingga menimbulkan efek langsung bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta berorientasi pada perdagangan bebas karena ketergantungan pada pasar internasional. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan strategi IOE ini yaitu persyaratan pendapatan per kapita mulai dari $800 sampai lebih dari $2000, kehadiran sebuah Negara yang kuat untuk mengontrol kekuatan internal maupun eksternal yang berpotensi menentang proses industrialisasi dan harus mampu mengeluarkan kebijakan kontroversial seperti pengontrolan upah buruh, suku bunga, inflasi, devaluasi, subsidi, pemberian insentif bagi eksportir, pemindahan sumber-sumber transektoral.[[32]](#footnote-33) Akan tetapi di Negara-negara berkembang lebih terkenal industrialisasi substitusi impor karena substitusi impor secara langsung menguntungkan kelompok-kelompok kepentingan yang kuat dan mapan, sementara promosi ekspor tidak banyak penyokongnya (Krugman & Obstfeld, 1999:303).

Selama ini pembangunan ekonomi hanya dinilai meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik dan kebudayaan.

Dengan adanya pembatasan di atas maka pengertian pembangunan ekonomi menurut Michael P Todaro dalam buku Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga edisi ketujuh yang diterjemahkan oleh Drs. Haris Munandar, M.A. pada umumnya didefinisikan sebagai berikut :

**“Pembangunan ekonomi adalah sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional untuk menciptakan dan mempertahan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto atau GNP (gross national product) pada tingkat lebih tinggi yang diukur melalui tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita sebagai indikator tingkat kemajuan pembangunan.”[[33]](#footnote-34)**

Ada empat indikator dalam pembangunan ekonomi, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, formasi modal, dan teknologi. Penulis menggunakan perspektif teori pola pembangunan (*Pattern of Development*) dari Hollis Chenery yang memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri dimana transformasi struktur produksi sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita berhubungan erat dengan akumulasi modal dan peningkatan sumber daya manusia (*human capital*). Sejalan dengan proses perubahan struktural, pada suatu tingkat tertentu terjadi penurunan konsumsi terhadap bahan makanan, khususnya dilihat dari permintaan domestik.

Perubahan terjadi di sektor perdagangan internasional yaitu peningkatan nilai ekspor dan impor. Selama perubahan struktural berlangsung akan terjadi peningkatan pangsa ekspor komoditi hasil produski sektor industri dan penurunan pangsa pasar sektor yang sama di sisi impor.

Transformasi struktural akan berjalan dengan baik bila diikuti pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan derajat dualism ekonomi antara kota dan desa. Jika hal tersebut dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan secara simultan.

Model transformasi perubahan struktural yang terjadi pada setiap negara sebenarnya dapat diidentifikasi dan proses perubahannya secara umum pada dasarnya memiliki kesamaan pola. Namun demikian, teori ini toleransi adanya variable-bariabel kecil yang terjadi dalam proses perubahan struktural mungkin berbeda antar negara. Perbedaan faktor *endowment,* kebijakan pemerintah dan aksesibilitas terhadap modal dan teknologi merupakan faktor penjelas terhadap perbedaan variatif transformasi struktural yang terjadi.

Pada dasarnya Negara-negara yang memiliki tingkat populasi tinggi dan tingkat permintaan potensial tinggi, cenderung mendirikan industri yang bersifat substitusi impor. Artinya mereka memproduksi barang-barang yang tadinya impor, kemudian dipasarkan di dalam negeri. Teori ini menjelaskan bahwa percepatan dan pola transformasi struktural yang terjadi pada suatu negara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (kebijakan perdagangan internasional dan bantuan dari Negara-negara maju) yang berkaitan satu dengan yang lainnya (Kuncoro, 2003:65-68).[[34]](#footnote-35)

Sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang mempunyai peran penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Adapun definisi pertumbuhan ekonomi menurut Samuelson dan Nordhaus yaitu :

**“Pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi GDP potensial atau output nasional negara. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi terjadi apabila batas kemungkinan produksi (production possibility frontier/PPF) bangsa bergeser ke luar. Konsep yang berkaitan erat adalah tingkat pertumbuhan output per orang. Ini menentukan tingkat ketika standar – standar hidup negara naik. Negara-negara terutama menaruh perhatian pada pertumbuhan output perkapita karena menyebabkan peningkatan rata-rata pendapatan ( Samuelson dan Nordhaus, 2003: 246)”**

Penulis menggunakan pendekatan pembangunan neoklasik Solow sebagai perluasan dari model Harrod-Domar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dimana tabungan dan investasi merupakan hal perlu ditingkatkan (dari model Harrod-Domar), tingginya tabungan dan investasi akan memperbesar kemungkinan peminjaman modal bagi masyarakat sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan menambahkan faktor kedua yaitu tenaga kerja, serta variabel baru yaitu teknologi. Menurut teori ini, pertumbuhan output itu selalu bersumber dari satu atau lebih faktor yaitu kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka, Negara yang terlibat didalamnya (perdagangan, investasi dengan pihak luar) akan mengalami suatu konvergensi peningkatan pendapatan per kapita, karena arus permodalan akan mengalir deras dari Negara-negara kaya ke negara miskin dimana rasio model tenaga kerjanya masih rendah sehingga menjanjikan imbalan atau tingkat keuntungan investasi yang lebih tinggi.[[35]](#footnote-36)

Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi maka dilakukanlah ekspor. Ditinjau dari sudut pengeluaran, ekspor merupakan salah satu faktor terpenting dari *Gross National Product* (GNP), sehingga dengan berubahnya nilai ekspor maka pendapatan masyarakat secara langsung juga akan mengalami perubahan. Di lain pihak, tingginya ekspor suatu negara akan menyebabkan perekonomian tersebut akan sangat sensitif terhadap keguncangan-keguncangan atau fluktuasi yang terjadi di pasaran internasional maupun di perekonomian dunia. Berikut ini pengertian ekspor dari salah satu ahli ekonomi menurut Todaro (2000) yaitu :

**“Ekspor adalah kegiatan perdagangan internasional yang memberikan rangsangan guna membutuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar, bersamaan dengan strukturpolitik yang stabil dan lembaga sosial yang fleksibel.”[[36]](#footnote-37)**

Sedangkan pengertian impor berdasarkan UU No.17 tahun 2006 kepabeanan adalah:

**“Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima.”[[37]](#footnote-38)**

Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa dipenuhi secara sendiri untuk menunjang pembangunan ekonomi, namun apabila dilakukan dalam batas yang berlebihan (melebihi nilai ekspor) dapat menyebabkan defisit transaksi berjalan yang berujung pada terhambatnya proses pembangunan ekonomi.

Ekspor dan impor merupakan salah satu indikator dalam ekonomi Makro. Cabang utama ilmu ekonomi ini berkaitan dengan performa ekonomi secara keseluruhan. Menurut Samuelson dan Nordhaus mendefinisikan makro ekonomi sebagai berikut :

**“Ekonomi makro atau makro ekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makro ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga (*household*), perusahaan, dan pasar (Samuelson dan Nordhaus, 2003:5).”**

Dalam teori makro ini, penulis menggunakan perspektif Keynes yang menyatakan tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh perbelanjaan agregat. Pada umumnya perbelanjaan agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Keadaan ini disebabkan oleh investasi yang dilakukan oleh para pengusaha biasanya adalah lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian pada tingkat kesempatan kerja penuh. Menurut Keynes, sistem pasar bebas dan fleksibilitas suku bunga tidak akan mewujudkan keadaan dimana investasi adalah sama dengan tabungan yang akan diwujudkan pada kesempatan kerja penuh. Suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Disamping berusaha untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, kebijakan pemerintah perlu pula untuk menstabilkan tingkat harga dan mencegah inflasi, mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan sektor luar negeri.

Tiga bentuk kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi yang dinyatakan atas kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan pengawasan langsung. Kebijakan fiskal dijalankan oleh Departemen Keuangan dan alat yang digunakan adalah melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah (perpajakan). Dalam masa inflasi biasanya kebijakan fiskal akan berbentuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Sedangkan, kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral. Alat kebijakan yang digunakan adalah mempengaruhi penawaran uang dan suku bunga (pengetatan dan pelonggaran). Sebagai tambahan kepada kedua kebijakan ini pemerintah dapat pula melakukan pengawasan langsung yaitu dengan membuat peraturan-peraturan.[[38]](#footnote-39)

Pada umumnya, tanpa adanya campur tangan pemerintah, seluruh pengeluaran dalam perekonomian tidak sesuai dengan jumlah yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh maka diperlukan kebijakan fiskal untuk mengatur itu semua. Adapun definisi kebijakan fiskal menurut Sadono Sukirno yaitu :

**“Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi (Sadono Sukirno, 1985: 264).”**

**Dalam kebijakan fiskal, penulis menggunakan pendekatan yang** mengacu pada kondisi ideal, bahwa kebijakan fiskal seharusnya bersifat countercyclical (kontraktif pada saat perekonomian booming untuk menghindari overheating dan ekspansif pada saat resesi untuk memberikan stimulasi), maka pendekatan keseimbangan internal tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan posisi kebijakan fiskal defisit, berimbang ataupun surplus. Untuk itu, strategi untuk menentukan posisi kebijakan fiskal (ekspansif/kontraktif) harus dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan: (i) menjaga keseimbangan internal yang esensinya difokuskan untuk pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan sesuai kapasitas perekonomian; dan (ii) menjaga keseimbangan eksternal yang esensinya menjaga stabilitas nilai tukar. Melalui dua pendekatan tersebut diharapkan kebijakan fiskal yang ditempuh akan berdampak pada terjaganya kesinambungan fiskal dan juga akan memberi kontribusi positif bagi stabilitas makro ekonomi. [[39]](#footnote-40)

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. maka Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Adapun pengertian kebijakan moneter menurut Nopirin (1992:45) adalah:

**“Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat”[[40]](#footnote-41)**

Dalam kebijakan moneter, penulis menggunakan pendekatan kebijakan moneter ketat untuk menjaga kestabilan harga (menekan inflasi). Selain itu, apabila suatu negara mengalami tekanan neraca pembayaran, kebijakan moneter tersebut juga dapat membantu mengatasi masalah neraca pembayaran yang dihadapi. Hal ini terjadi jika kebijakan moneter tersebut dapat menekan inflasi sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan daya saing barang ekspor di pasaran internasional. Selain itu, penurunan inflasi dapat meningkatkan suku bunga riil dalam negeri sehingga dapat mencegah pengaliran modal ke luar negeri.[[41]](#footnote-42)

Mata uang asing merupakan alat transaksi dalam ekspor-impor, untuk menentukan nilai uang asing itu dalam suatu negara perlu ditentukan kurs atau nilai pertukarannya. Frank J. Fabozzi dan Franco Modigliani (1992:664)[[42]](#footnote-43) memberikan defenisi mengenai nilai tukar sebagai berikut:

**”*An exchange rate is defined as the amount of one currency that can be exchanged per unit of another currency, or the price of one currency interms of another currency* (**Kurs valuta asing merupakan nilai seunit valuta (mata uang) asing apabila ditukarkan dengan mata uang dalam negeri**)*”***

Perubahan nilai tukar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu depresiasi (pelemahan) dan apresiasi (penguatan). Sistem nilai tukar terbagi menjadi nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) dan nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*).

Dalam sistem kurs mengambang, harga valuta asing ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasaran. fluktuasi yang tidak teratur dapat mempengaruhi tingkat harga, tingkat kegiatan ekonomi dan keadaan kesempatan kerja. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan skedul permintaan dan penawaran, diantaranya adalah (Hady, 2001 : 46 dan Madura, 2009 : 99 - 105)[[43]](#footnote-44):

1. Posisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran (*balance of payments*) merupakan catatan tentang semua transaksi ekonomi internasional (perdagangan, keuangan dan moneter) antara penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri dalam suatu periode tertentu. Catatan yang meliputi ekspor barang dan jasa (penawaran valuta asing), impor barang dan jasa (permintaan valuta asing), dan modal dalam suatu periode tertentu ini akan menghasilkan posisi saldo positif (surplus) atau negatif (defisit).
2. Laju inflasi relatif. Perubahan laju inflasi relatif dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional, yang pada gilirannya memengaruhi permintaan dan penawaran mata uang. Kenaikan tingkat harga (inflasi) produk domestik dapat meningkatkan permintaan produk impor, sehingga mendorong meningkatnya permintaan terhadap mata uang asing. Kondisi ini, *ceteris paribus*, akan mengakibatkan nilai mata uang dalam negeri melemah (depresiasi) dan mata uang negara yang diimpor produknya akan menguat (apresiasi).
3. Suku bunga relatif. Perubahan suku bunga relatif akan memengaruhi investasi pada surat-surat berharga. Suku bunga yang perlu diperhatikan adalah suku bunga riil karena mengkombinasikan inflasi dan suku bunga, dua faktor yang dapat memengaruhi nilai tukar4.
4. Tingkat pendapatan relatif. Pendapatan memengaruhi permintaan atas produk impor. Perubahan tingkat pendapatan juga dapat memegaruhi nilai tukar secara tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap suku bunga.
5. Kontrol pemerintah. Pemerintah dapat memengaruhi nilai tukar melalui berbagai cara, misalnya dengan membatasi nilai tukar mata uang asing, perdagangan luar negeri, intervensi pasar, dan memengaruhi variabel makro seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan pendapatan.
6. Ekspektasi. Pasar mata uang asing bereaksi terhadap berita apapun yang dapat memengaruhi nilai tukar di masa yang akan datang. Para investor, terutama investor institusional mengambil posisi mata uang berdasarkan prediksi pergerakan suku bunga di berbagai negara. Biasanya transaksi mata uang asing yang berhubungan dengan perdagangan cenderung kurang responsif terhadap isu. Sedangkan transaksi aliran finansial cenderung sangat responsif terhadap isu.

Untuk menghindari implikasi buruk tersebut sering kali Bank Sentral melakukan jual beli valuta asing dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi harga valuta asing. Jika harga valuta asing terlalu mahal, Bank Sentral akan menjual valuta asing (devisa) dan sebaliknya. Intervensi ini dinamakan *dirty float* ataun *managed float*. Aliran valuta asing dari waktu ke waktu sebagai akibat investasi dari luar negeri dan sebaliknya, transaksi seperti itu oleh bank sentral dan nilainya ditunjukkan dalam neraca pembayaran.[[44]](#footnote-45)

Neraca pembayaran terbagi atas dua bagian utama yaitu transaksi berjalan (*current account*) dan lalu lintas modal (*capital account*). Dalam transaksi berjalan dicatat nilai ekspor dan impor, dan nilai transaksi jasa-jasa seperti pariwisata, royalty, pengangkutan, pembayaran utang dan pembayaran asuransi. Selisih diantara nilai ekspor dan nilai impor dinamakan neraca perdagangan, dan selisih di antara ekspor barang dan jasa dengan impor barang dan jasa dinamakan neraca berjalan. Sedangkan neraca modal menunjukkan nilai lalu lintas modal dari Negara tersebut ke atau dari Negara-negara lain. Neraca modal dibagi dua yaitu modal jangka pendek dan modal jangka panjang.[[45]](#footnote-46)

Bank sentral merupakan lembaga negara yang berkuasa menegendalikan kebijakan moneter nasional. Peluang pemanfaatan kebijakan moneter yang lebih luas itu lah yang sangat diperlakukan oleh pembuat kebijakan, diantaranya berfungsi dalam penerbitan mata uang, serta pengawasan dan regulasi sistem keuangan secara keseluruhan. Stabilitas finansial diyakini sebagai suatu hal yang sangat penting bagi terciptanya proses pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.[[46]](#footnote-47) Adapun definisi bank sentral menurut Kisch dan Elkin (1932), Bank Sentral adalah:

“**Bank sentral adalah bagian dari kebijakan publik dan bukan merupakan instrumen dari kepentingan pribadi’. Bank sentral menerapkan (dan kadang membantu memformulasikan) kebijakan publik pada sektor perbankan, dan yang terkait dengan variabel ekonomi yang dapat dipengaruhi melalui sektor perbankan.”[[47]](#footnote-48)**

Dalam sistem moneter internasional, keberadaan *The Federal Reserve* atau bank sentral Amerika mempunyai peran sentral dalam menentukan dan menjaga stabilitas finansial global melalui kebijakan moneternya sebab dollar adalah mata uang utama dalam transaksi perdagangan internasional. Dalam menentukan suku bunga jangka pendek, dapat mempengaruhi pasar keuangan, kekayaan, output, ketenagakerjaan dan harga. Oleh karena itu, pengaruh *The Fed* menyebar tidak hanya di Amerika Serikat melainkan juga diseluruh penjuru dunia, melalui hubungan keuangan dan perdagangan. Berikut definisi *The Federal Reserve* menurut *businessdictionary* :

**“Federal Reserve adalah bank sentral Amerika yang terdiri dari 12 cabang tersebar di setiap negara bagian (federal) mengawasi semua bank nasional dan bank swasta dan beberapa perusahaan kepercayaan. The Fed berusaha untuk mengendalikan ekonomi Amerika Serikat dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga jangka pendek dan jumlah uang beredar yang dimiliki oleh swasta"[[48]](#footnote-49)**

Tujuan utama *The Fed* adalah inflasi yang rendah dan stabil. Upaya juga dimaksudkan untuk mendorong terjadinya pertumbuhan output nasional yang terus menerus, tingkat pengangguran yang rendah, dan pasar keuangan yang tertib. Jika output naik dengan cepat dan inflasi meningkat, Dewan *Federal Reserve* mungkin akan menguatkan suku Bunga, karena tindakan itu akan mengerem perekonomian dan mengurangi tekanan harga. Jika ekonomi lamban dan usaha tidak berjalan, Fed akan mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga, sebagai langkah yang akan mendorong permintaan aggregat, peningkatan output, dan mengurangi pengangguran. (Samuelson dan Nordhaus, 2003:220-222).

Dalam mencegah inflasi yang berlebihan akibat *quantitive easing* (kebijakan moneter longgar ) saat kondisi ekonomi Amerika membaik maka dikeluarkanlah kebijakan *tapering off*, seperti yang dikatakan *The* [*Federal Open Market Committee*](http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20131218a.htm) yaitu:

**"Awal Januari 2014, Komite akan menambah kepemilikan sekuritas berbasis mortgage lembaga dengan besaran $ 35 miliar per bulan dan bukan dari $ 40 miliar per bulan, dan akan menambah kepemilikan surat berharga jangka panjang dengan besaran sebesar $40 miliar per bulan dan bukan dari $ 45 miliar per bulan."[[49]](#footnote-50)**

Senada dengan FOMC dalam konferensi press terakhirnya, Gubernur The Fed, Ben Bernanke mengatakan :

**“Pembelian obligasinya akan dipangkas secara berkala mulai tahun depan. Jika tingkat pengangguran terus berkurang sesuai yang diharapkan, program tersebut (quatitive easing) sepenuhnya akan diakhiri pada 2014. Pemulihan jelas masih jauh dari target, tapi kami berharap bisa melihat titik terang sebagai tanda pulihnya ekonomi AS secara sempurna”**

Dari pernyataan Gubernur *The Fed* tersebut menandakan penarikan stimulus itu dapat dilakukan dalam jangka waktu secepatnya apabila tingkat pengangguran turun dibawah 6 %. Sedangkan tingkat pengangguran di Amerika menunjukan penurunan menjadi 5,6% sehingga *the Fed* dipastikan mengeluarkan kebijakan *Tapering off.*[[50]](#footnote-51)

*The Fed* juga berencana untuk menaikkan suku bunga acuannya pada tahun ini (2015). Gubernur *The Fed* yang baru Janet Yellen mengungkapkan hal itu pada hari sabtu, 28 Maret 2015, namun diundur pelaksanaannya berikut pernyataannya pada 22 Mei 2015 :

***"If the economy continues to improve as I expect, I think it will be appropriate at some point this year to take the initial step to raise the federal funds rate target and begin the process of normalizing monetary policy. To support taking this step, though, I will need to see continued improvement in labor market conditions, and I will need to be reasonably confident that inflation will move back to 2 percent over the medium term."[[51]](#footnote-52)***

Sistem ekonomi suatu Negara dikatakan bersifat khas, sehingga dapat dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di Negara lain, Indonesia sendiri menerapkan sistem ekonomi Pancasila atau persaingan terkendali. Adapun penjelasan mengenai sistem ekonomi Indonesia (terkendali) seperti yang diungkapkan oleh Dumairy dalam bukunya Perekonomian Indonesia yaitu :

**“Sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem yang mengakui kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara yang diatur dengan tegas dalam pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia buka kapitalisme dan bukan pula sosialisme.”[[52]](#footnote-53)**

Salah satu upaya negara untuk mengurangi ketimpangan antar daerah/wilayah tentunya melalui pemerataan pembangunan pada daerah-daerah.Pembangunan regional merupakan bagian integral dalam pembangunannasional karena pembangunan Indonesia tidak lepas dari posisi Indonesia dalam dinamika regional dan global yang secara geografis Indonesia terletak di jantung pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan demikian diharapkan hasil pembangunan akan dapatterdistribusi dan teralokasi ke tingkat regional. Seperti yang dikatakan oleh Mandala Harefa, Periset Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi Sekretarian Jenderal DPR RI mendefinisikan pembangunan ekonomi Indonesia sebagai berikut :

**“Pembangunan ekonomi Indonesia merupakan upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Selama kurun waktu yang cukup panjang, melalui perubahan struktur ekonomi untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditandai oleh perubahan dari sektor pertanian menjadi struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri manufaktur.”[[53]](#footnote-54)**

Indikator kesuksesan ekonomi Indonesia tercermin dalam tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator utama dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Adapun definisi pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah :

**“Pertumbuhan Ekonomi Indonesia adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dimana perekonomian Indonesia tahun 2014 diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 10 542,7 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp41,8 juta atau US$3,531.5 yang secara mayoritas di dominasi oleh pendapatan dari Pulau jawa dengan pertumbuhan rata-rata 5,02% (dibawah 6%) per tahun.”[[54]](#footnote-55)**

Secara garis besar ada tiga variabel yang mempengaruhi ekonomi makro Indonesia yaitu, variabel yang pertama berhubungan dengan  nilai tukar rupiah berupa  nilai keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap mata uang dalam negeri maupun mata uang asing. Merosotnya nilai tukar rupiah merefleksikan menurunnya permintaan masyarakat terhadap mata uang rupiah karena menurunnya peran perekonomian nasional atau karena meningkatnya permintaan mata uang asing sebagai alat pembayaran internasional. Dampak yang akan terjadi adalah meningkatnya biaya impor bahan bahan baku.

Variabel yang kedua adalah tingkat suku bunga, dimana akan terjadi meningkatnya nilai suku bunga perbankan yang akan  berdampak pada perubahan investasi di Indonesia. Sedangkan variabel  yang ketiga adalah terjadinya Inflasi, meningkatnya harga-harga secara umum dan kontinyu, akibat komsumsi  masyarakat  yang meningkat, dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi dan spekulasi.[[55]](#footnote-56)

Dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia perlu menjaga dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil.  Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan *BI Rate* sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi melalui kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia (kebijakan moneter ketat).[[56]](#footnote-57) Adapun definisi kebijakan moneter Indonesia menurut bank Indonesia adalah :

**“Kebijakan moneter Indonesia adalah kebijakan pemerintah menyangkut perilaku bank sentral dalam penawaran uang dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara yang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga serta pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) juga tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.”[[57]](#footnote-58)**

Berdasarkan konsep dan teori yang dikemukakan para ahli diatas berkenaan dengan objek penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa asumsi :

1. Pasca krisis Amerika 2008 subprime mortgage, *The Federal Reserve* mengeluarkan kebijakan pelonggaran moneter yang disebut quantitive easing / tapering (stimulus) dalam rangka memulihkan ekonomi Amerika sehingga dollar membanjiri pasar uang di seluruh dunia.
2. Pada akhir tahun 2013 *The Federal Reserve* mengumumkan bahwa kondisi ekonomi Amerika membaik yang ditandai oleh berkurangnya pengangguran dan meningkatnya daya beli masyarakat Amerika sehingga diumumkanlah penarikan stimulus (*tapering off*) pada Desember 2013 dan dilaksanakan pada Januari 2014 disertai dengan kenaikan suku bunga pada pertengahan 2015. Ini dilakukan supaya tidak menimbulkan hiferinflasi dan menekan defisit neraca perdagangan.
3. Melambatnya kondisi ekonomi global akibat kebijakan *The Fed* menyebabkan permintaan komoditas global turut melambat sehingga memperburuk defisit neraca transaksi berjalan karena ekspor utama Indonesia merupakan komoditas dan pengimpor bahan baku industri.
4. Kebijakan moneter ketat *The Fed* menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah (depresiasi), *capital outflow*, defisit neraca berjalan dan meningkatkatnya inflasi.
5. Pemerintah melalui kebijakan fiskal ekspansif (pembangunan infrastruktur dan pajak) serta Bank Indonesia melalui kebijakan moneter ketat (suku bunga tinggi dan operasi pasar terbuka) dapat menekan defisit transaksi berjalan supaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
6. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka penelitian dan asumsi yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

**“Jika *The Federal Reserve* mengimplementasikan kebijakan moneter ketat melalui penarikan stimulus (*tapering off*) dan ketidakpastian suku bunga (*fedrate*) maka kebijakan dalam memelihara ruang fiskal dan moneter perlu adanya harmonisasi dan koordinasi secara terencana supaya neraca transaksi berjalan dapat memelihara stabilitas nilai tukar rupiah bagi pembangunan ekonomi di Indonesia”**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

**Tabel.1.1 Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis****(Teoritik)** | **Indikator****(Empirik)** | **Verifikasi****(Ananlisis)** |
| Variabel Bebas:Jika *The Federal Reserve* mengimplementasikan kebijakan moneter ketatVariabel Terikat :maka kebijakan dalam memelihara ruang fiskal dan moneter perlu adanya harmonisasi dan koordinasi supaya neraca transaksi berjalan dapat memelihara stabilitas nilai tukar rupiah bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. | 1. Kebijakan penarikan stimulus (*tapering off*)
2. Ketidakpastian suku bunga (*fedrate)*
3. Neraca perdagangan
4. Neraca jasa
 | 1. Komite memutuskan secara bertahap mengurangi laju pembelian aset pada awal Januari 2014, Komite akan menambah kepemilikan sekuritas berbasis mortgage sekitar $ 35 miliar per bulan dan bukan $ 40 miliar per bulan, serta akan menambah kepemilikan jangka panjang sekuritas Treasury sebesar $ 40 miliar per bulan dan bukan $ 45 miliar per bulan. (<http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20131218a.htm>)
2. The Federal Reserve membuka jalan untuk menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan tetapi tidak terburu-buru untuk bertindak selama inflasi jinak dan pertumbuhan ekonomi yang moderat. Yellen dan pejabat lainnya Fed telah mengatakan, mereka ingin suku bunga mulai bergerak kembali ke tingkat "normal",yang diperkirakan antara 3,5 dan 4 persen. (http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/03/18/fed-signals-that-higher-interest-rates-are-coming/)
3. Federal Reserve mengisyaratkan bahwa menaikkan suku bunga bisa pada pertemuan apapun, kenaikan suku bunga kemungkinan pertengahan musim panas. The Fed menunjukkan kenaikan suku bunga juga bisa terjadi pada pertemuan Fed pada 28-29 Juli atau bahkan 27-28 Oktober. (<http://www.usatoday.com/story/money/business/2015/04/29/fed-raise-rates-any-meeting/26589965/>)
	* + 1. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui tidak ada cara instan yang bisa dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelemahan rupiah, pemerintah mencoba untuk memperbaiki sisi makro ekonomi Indonesia. Ke depannya, yang bisa dilakukan pemerintah tentunya bekerjasama dengan Bank Indonesia yakni menurunkan devisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Pada 2012 CAD Indonesia tahun lalu 2,9 persen. Tahun ini diperkirakan akan dikisaran 3 persen. (<http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/03/06/367613/pemerintah-fokus-ke-cad-guna-redam-fluktuasi-rupiah>)
			2. Bank Indonesia (BI) akan tetap fokus pada kebijakan yang bertujuan menjaga defisit transaksi berjalan (moneter ketat )supaya investor asing tidak menarik dananya dari Indonesia, yang menyebabkan rupiah menjadi salah satu mata uang turun paling tajam terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19

Mei 2015 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50%, ([Laporan](http://katadata.co.id/berita/2015/03/30/bi-tetap-fokus-turunkan-defisit-transaksi-berjalan#sthash.AGsrkIrn.dpuf) Kebijakan Moneter Triwulan I 2015 Bank Indonesia)1. Melalui momentum tren pelemahan nilai tukar, pemerintah akhirnya mengambil inisiatif dengan mengeluarkan tujuh paket kebijakan untuk memperbaiki kinerja transaksi jasa setelah selama lebih dari satu dekade secara konsisten mengalami defisit.

(http://hprpdailynews.com/2015/03/17/paket-kebijakan-ekonomi-perbaikan-neraca-jasa-jadi-fokus/) |

1. **Skema Kerangka Pemikiran**

Indonesia

The Federal Reserve

Kebijakan Moneter Ketat

Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan Moneter Ketat

Neraca Transaksi Berjalan

Ketidakpastian Suku Bunga (*Fedrate*)

Penarikan Stimulus (*tapering off*)

Pembangunan Ekonomi Indonesia (Stabilitas Nilai Tukar Rupiah)

**Judul Penelitian :**

**Pengaruh Kebijakan The Federal Reserve Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesi**

1. **Metode dan Teknik Pengumulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Menurut Mochtar Mas’oed sebagai adaptasi dari RF Hopkins dan RW Mansbach dalam bukunya yang berjudul Structure and Process in International Politics memaparkan bahwa ada tiga tingkat analisis umum yang digunakan dalam studi hubungan internasional, yaitu: 1) Individu dan Kelompok 2) Negara - Bangsa 3) Sistem Regional dan Global.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tingkat analisis sistem Negara dan Bangsa.Untuk menentukan jenis hubungan tingkat analisis harus dilihat dari hubungan anatara unit analisis dengan unit eksplanasi dimana penelitian ini ditekankan pada tingkat analisa reduksionis dimana tingkat unit eksplanasi berada pada tingkat lebih rendah dibanding unit analisis.

1. **Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara yang ditetapkan dalam melakukan kajian terhadap masalah yang bertujuan untuk mencari jawaban dan cara pemecahan berdasarkan data yang terhimpun. Untuk keperluan penelitian maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

* + 1. **Metode Deskriptif Analisis**

Yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan secara sistematik suatu peristiwa atau masalah menjadi topik kajian secara sistematik dan mengandalkna analisa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dari sudut sebab akibat dan penyusunan data namun meliputi analisis dan interpretasi data-data. Dalam hal ini penulis menjelaskan sebab dan dampak dari kebijakan moneter The Federal Reserve terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mencari dan mengumpulkan bahan informasi ataupun dokumentasi penulis menggunakan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu studi pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari arsip-arsip, laporan-laporan serta data informasi yang diperlukan dari berbagai bahan seperti buku-buku wajib, surat kabar, majalah, artikel, serta makalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Juga melalui media Internet yang berupa ebook, e-jurnal, e-paper dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF).

1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
	* + - 1. **Lokasi Penelitan**

Dalam pengumpulan data dan infromasi yang akan dipergunakan dalam pembuatan skripsi ini sesuai dengan judul dan pembahasannya, penulis mengunjungi beberapa perpustakaan sebagai berikut :

1. Perpustakaan Fisip Universitas Pasundan Bandung

Jln. Lengkong Besar no.68 Bandung.

1. Perustakaan Universitas Parahyangan Bandung

Jln. Ciumbuleuit no.94, Bandung.

1. Perpustakaan Bapusipda Bandung

Jln. Soekarno Hatta No.629 Bandung.

1. Perpustakaan ITB Bandung

Jln. Ganesha, No 10 Bandung.

* 1. **Lama Penelitian**

Lama penelitian dalam penulisan skripsi ini kurang lebih 6 bulan, sejak bulan Desember 2014 sampai Mei 2015. Berikut jadwal lengkap kegiatan penelitian ini:

1. **Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, asumsi, hipotesis, variable operasional, skema kerangka teoritis, metode dan teknik penelitian, lokasi dan lama penelitian, sistematika penulisan.

BAB IITINJAUAN UMUM THE FEDERAL RESERVE

Bab ini menguraikan variabel bebas mengenai Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve.

BAB III DINAMIKA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Bab ini menguraikan variable terikat mengenai pembangunan ekonomi Indonesia yang ditekankan pada nilai tukar rupiah (*currency*).

BAB IVKEBIJAKAN RUANG FISKAL DAN MONETER PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DAN KORELASINYA DENGAN KEBIJAKAN MONETER THE FEDERAL RESERVE

Bab ini menganalisa tentang korelasi kebijakan ruang fiskal dan moneter pembangunan ekonomi Indonesia dengan kebijakan moneter The Federal Reserve.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian atas analisa bab IV. Kesimpulan ditulis dalam bentuk singkat namun jelas dan informatif.

1. Subprime mortgage adalah Kredit subprima atau dalam istilah asing disebut *subprime lending*, ataupun sering juga disebut *B-Paper* (surat utang peringkat "B") , *near-prime* (mendekati prima) atau pinjaman *"second chance"*(kesempatan kedua), adalah suatu istilah yang digunakan pada praktik pemberian [kredit](http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit) kepada peminjam (debitur) yang tidak memenuhi [persyaratan kredit](http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_%28keuangan%29#Syarat_kredit) untuk diberikan pinjaman berdasarkan suku bunga pasar oleh karena debitur tersebut memiliki "catatan kredit" yang kurang baik. Kredit subprimer ini sangat berisiko baik bagi pemberi pinjaman (kreditur) maupun bagi peminjam (debitur) oleh karena kombinasi antara tingginya suku bunga yang dikenakan, catatan kredit yang buruk, dan kerap kali dalam permohonan kredit ditemui pula situasi keuangan debitur yang kurang baik. Sehingga kredit subprima ini ditawarkan dengan pengenaan suku bunga yang lebih tinggi daripada suku bunga kredit yang berlaku secara umum bagi kredit dengan peringkat "A" (A-paper). (sumber : Wikipedia.com). [↑](#footnote-ref-2)
2. Teguh Sihono, “Dampak Krisis Finansial Amerika Serikat Terhadap Perekonomian Asia,” dalam Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol. 6, No. 1, (April 2009), hlm. 2-4. [↑](#footnote-ref-3)
3. Friska Yolandha, “Bank Sentral Amerika Kurangi Stimulus Januari 2014”, Republika (online), 19 Desember 2013 dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/13/12/19/my16yl-bank-sentral-as-kurangi-stimulus-moneter-januari-2014> diakses 27 januari 2014 [↑](#footnote-ref-4)
4. Asnil Bambani Amri et al, “Apa itu Quantitive Easing? Apa itu Tapering?”, Kontan (online), 23 Desember 2013 dalam <http://fokus.kontan.co.id/news/apa-itu-quantitative-easing-apa-itu-tapering> diakses 27 januari 2014 [↑](#footnote-ref-5)
5. ######  “Ekonomi Dunia Diperkirakan Tumbuh 3,5%”, Sindonews (online), 23 Desember 2014 dalam <http://ekbis.sindonews.com/read/941192/35/ekonomi-dunia-diperkirakan-tumbuh-3-5-1419321660> diakses 24 Februari 2015.

 [↑](#footnote-ref-6)
6. “BPS: Ekonomi Global Sedang Tidak Menggairahkan”, Sindonews (online), 5 November 2014Dalam <http://ekbis.sindonews.com/read/920039/33/bps-ekonomi-global-sedang-tidak-menggairahkan-1415169358> diakses 24 februari 2014. [↑](#footnote-ref-7)
7. Kukuh Budiman, “Nilai Ekspor Tahun 2014 Kumulatif Turun 3,43 Persen”, 2 Februari 2015, dalam <http://obsessionnews.com/nilai-ekspor-tahun-2014-kumulatif-turun-343-persen/>, diakses 6 Maret 2015. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ahmad Erani Yustika, *Pembangunan dan Krisis : Memetakan Perekonomian Indonesia* ( Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm xii. [↑](#footnote-ref-9)
9. Yanto Bashri, *Mau Ke Mana Pembangunan Ekonomi Indonesia : Prisma Pemikiran Prof. Dr. Dorojatun Kuntjoro –Jakti* (Jakarta : Prenada, 2003), hlm. 211-214. [↑](#footnote-ref-10)
10. Elba Damhuri, “Ini Dua Dampak Tapering Off Bagi Indonesia”, Republika (online), 19 December 2013, dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/12/19/my1z70-ini-dua-dampak-tapering-off-bagi-ekonomi-indonesia> diakses 27 januari 2014 [↑](#footnote-ref-11)
11. #  [Arsy Sucianingsing](http://index.sindonews.com/blog/2345/arsy-sucianingsing), “Krisis Ekonomi Dunia Bakal Alami Tiga Fase”, Koran Sindo(online), 27 Februari 2015, dalam <http://ekbis.sindonews.com/read/970029/35/krisis-ekonomi-dunia-bakal-alami-tiga-fase-1425039620> diakses 2 Maret 2015.

 [↑](#footnote-ref-12)
12. Umar Suryadi Bakry, *Pengantar Hubungan Internasional* (Jakarta: Jayabaya University Press, 1999), hlm.1 [↑](#footnote-ref-13)
13. Peter A.Toma and Robert F. Gorman, *International Relatons : Understanding Global Issues* (California: Wadsworth. Inc, 1991), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-14)
14. Mersheimer, John J. “*Structural Realism”* in: Tim Dunne, Miljka Kurki and Steve Smith [eds.] International Relations Theories. Oxford: University Press, 2007. hal. 71-88 [↑](#footnote-ref-15)
15. Umar Suryadi Bakry, Op. Cit., hlm 107. [↑](#footnote-ref-16)
16. David E. Apter, *K.J.Holsti : Pengantar Analisa Politik Internasional* (Jakarta: LP3ES Cetakan Pertama, 1985), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-17)
17. Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional 2*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 23. [↑](#footnote-ref-18)
18. [abarbakoff1](https://juliabrown2612.wordpress.com/author/abarbakoff1/), Hegemonic Stability Theory in the Context of Monetary Exchange, dalam <https://juliabrown2612.wordpress.com/2015/01/21/hegemonic-stability-theory-in-the-context-of-monetary-exchange/>, diakses 8 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-19)
19. Yanuar Ikbar, *Loc. Cit*., [↑](#footnote-ref-20)
20. K.J.Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*, (Terjemahan M. Tahrir Azhari). (Jakarta : Erlangga, 1988), hlm. 652-653. [↑](#footnote-ref-21)
21. F.X Wawolangi, “Soft Power dalam Politik Luar Negeri”, Skripsi FISIP-HI UI (pdf), 2010, dalam <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132946-T+27791-Politik+luar-Tinjauan+literatur.pdf> diakses 7 desember 2014. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.,* hlm.14. [↑](#footnote-ref-23)
23. Robert Gilpin, *US Power and Multinational Coorperation* ( Priceton : 1987 ), hlm.13-14 [↑](#footnote-ref-24)
24. Vita Rudiany, “International Political Economy Introductions”, dalam [http://vita\_rudiany-fisip11.web.unair.ac.id/artikel\_detail-73805-Ekonomi%20Politik%20Internasional-International%20Political%20Economy:%20Introducing.html](http://vita_rudiany-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-73805-Ekonomi%20Politik%20Internasional-International%20Political%20Economy%3A%20Introducing.html) diakses 5 Maret 2015. [↑](#footnote-ref-25)
25. Daniel lenfter, Currency War, dalam https://radikaloptimist.files.wordpress.com/2015/01/lentfer-currency-wars.pdf, diakses 10 mei 2015. [↑](#footnote-ref-26)
26. “Penyelamatan Rupiah Dari Perang Mata Uang Global” dalam <http://vibiznews.com/2013-02-22/penyelamatan-rupiah-dari-perang-mata-uang-global>, diakses 10 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-27)
27. Paul R. Krugman dan Maurice Obsteld, *Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan* (Terjemahan Faisal H. Basri ) (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), hlm. 2-4. [↑](#footnote-ref-28)
28. Dominick Salvatore, Ekonomi Internasional Edisi Kedua, Terjemahan Rudy Sitompul, (Jakarta:Erlangga, 1992) hal. 2 [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid., hlm. 15 [↑](#footnote-ref-30)
30. Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Edisi Kedua, (terjemahan Faisal H. Basri) (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999) hal. 40-41. [↑](#footnote-ref-31)
31. Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional* (Yogyakarta : Kanisius, 2002), hlm.27. [↑](#footnote-ref-32)
32. Bob Sugeng hadiwinata, *Loc. Cit.,* hal.87-88. [↑](#footnote-ref-33)
33. Michael P.Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (terjemahan Drs. Haris Munandar, M.A.) (Jakarta : Erlangga, 2000), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-34)
34. Subandi, Ekonomi Pembangunan, (Bandung: Alfabeta,2014), hal. 55-56. [↑](#footnote-ref-35)
35. Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*, terjemahan Haris Munandar, (Jakarta: Erlangga, 2000) Hal 117 [↑](#footnote-ref-36)
36. Michael P.Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (terjemahan Drs. Haris Munandar, M.A.) (Jakarta : Erlangga, 2000), hlm. 137. [↑](#footnote-ref-37)
37. “Makalah Ekspor-Impor”, dalam <http://cwegigs.blogspot.com/2010/10/makalah-ekspor-impor.html> diakses 4 Maret 2015. [↑](#footnote-ref-38)
38. Sadono Sukirno, Makroekonomi Modern, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) Hal.19-20 [↑](#footnote-ref-39)
39. “Strategi Kebijakan Ekspansif/Kontraktif Dalam APBN Jangka Menengah”, dalam <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/edef-konten-view.asp?id=20150327133202660066376> diakses 20 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-40)
40. Nopirin, *Ekonomi Internasional* (Yogyakarta : BPFE-UGM, 1992), hlm, 45. [↑](#footnote-ref-41)
41. Aulia Pohan, Potret kebijakan Moneter Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) hal. 59 [↑](#footnote-ref-42)
42. Frank J. Fabozzi dan Modigliani, Franco, *Capital Markets,* Prentice Hall, New Jersey, 1995 dalam The Fei Ming, *Day Trading Valuta Asing,* Gramedia, Jakarta, 2002. [↑](#footnote-ref-43)
43. Muhammad Afdi Nizar, “Pengaruh Jumlah Turis dan Devisa Pariwisata ”, Makalah dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Jakarta. Dalam <http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDERJURNAL/2014_kajian_pkem_Pengaruh%20Pariwisata%20Terhadap%20Nilai%20Tukar%20Rupiah.pdf> diakses 20 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-44)
44. Sadono Sukirno, Makroekonomi Modern, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) Hal.197-199 [↑](#footnote-ref-45)
45. Sadono Sokirno, *Loc. Cit*., hl.199-200. [↑](#footnote-ref-46)
46. Reno Satria et al, “Bank Sentral di Negara China, Korea Selatan dan Jepang”, Makalah Tugas Kebanksentralan, 13 Oktober 2014, dalam https://www.facebook.com/permalink.php?id=259793677556029&story\_fbid=297327260469337 diakses 4 Maret 2015. [↑](#footnote-ref-47)
47. Ibid., [↑](#footnote-ref-48)
48. “The Federal Reserve Definition, dictionary ” dalam [http://www.thefreedictionary.com/Federal+Reserve](http://www.thefreedictionary.com/Federal%2BReserve), diakses 7 Maret 2015. [↑](#footnote-ref-49)
49. “Fed Says It Will Begin Tapering Off Its Stimulus In January”, December 18, 2013, dalam <http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2013/12/18/255253296/fed-says-it-will-begin-tapering-off-its-stimulus-in-january> diakses 5 maret 2015. [↑](#footnote-ref-50)
50. “Angka Pengangguran Amerika Menuru”, VOA (online), 07 Maret 2015, dalam <http://www.voaindonesia.com/content/angka-pengangguran-di-as-menurun/2593024.html> diakses 5 maret 2015. [↑](#footnote-ref-51)
51. #  [Everett Rosenfeld](http://www.cnbc.com/id/101646706),” Yellen: Rate hike appropriate this year if economy improves” dalam <http://www.cnbc.com/id/102701500> diakses 24 Mei 2015.

 [↑](#footnote-ref-52)
52. Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Erlangga, 1996), hlm. 33. [↑](#footnote-ref-53)
53. Mandala harefa, “Kebijakan pembangunan dan kesenjangan antar Daerah”, Makalah, dalam <http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_tim/buku-tim-16.pdf>. diakses 4 Maret 2015. [↑](#footnote-ref-54)
54. “ Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” dalam laporan Jurnal BPS (online), No. 17/02/Th.XVIII (5 Februari 2015), hlm, 1. Dalam <http://www.bps.go.id/getfile.php?news=1179> diakes 4 maret 2015. [↑](#footnote-ref-55)
55. Hugo Lidero, “Menyimak Dampak Melemahnya Nilai Tukar Rupiah”, dalam http://www.rri.co.id/post/editorial/127/editorial/menyimak\_dampak\_melemahnya\_nilai\_tukar\_rupiah.html , diakses 8 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-56)
56. “Transmisi Kebijakan Moneter”, dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/transmisi-kebijakan/Contents/Default.aspx> diakses 4 maret 2015. [↑](#footnote-ref-57)
57. ###  “[Makalah Kebijakan Moneter](Makalah%20Kebijakan%20Moneter)”, dalam <http://kebijkanmoneter.blogspot.com/> diakes 4 Maret 2015.

 [↑](#footnote-ref-58)